

**MODALITAS SOSIAL POLITIK:  
Studi Kasus Kemenangan Ferdinandus Mazmur (FM) pada Pemilu Legislatif di  
Dapil V Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019**

**Oleh  
A. Mbolang, F.B. Tokan dan V. I A. Boro**

**Abstrak**

Modalitas sosial politik merupakan sebuah kekuatan niscaya yang mesti dimiliki para kontestan ketika hendak berlaga dalam pesta demokrasi. Karena modalitas sosial politik berupa modal politik, modal ekonomi dan modal sosial sangat efektif memenangkan kontestasi politik.

Temuan membuktikan bahwa sinergitas dari berbagai modalitas sangat signifikan menentukan kemenangan seseorang dalam kontestasi politik dan sekaligus memberi beban politik berbiaya tinggi bagi para kontestan.

Kasus kemenangan FM dalam kontestasi politik pemilu legislatif di Kabupaten Manggara Timur pada tahun 2019 sedikit berbeda karena modal politik dan ekonomi yang terbatas mampu memberi kemenangan bagi dirinya. FM ternyata memiliki keunggulan modal sosial yang tak pernah dibayangkan oleh lawan politiknya, sehingga mampu menggeser figur kuat lain yang lebih mengandalkan modal politik dan ekonomi semata.

Karena itu bagi para calon kontestan yang tidak memiliki kesiapan modalitas sosial politik memadai, apalagi mengabaikan salah satu aspek dari berbagai aspek lain dalam perhelatan politik sudah pasti akan tersingkir dari kompetisi politik.

Para kontestan peserta pemilu legislatif yang telah terpilih, bila tak ingin kalah dalam perhelatan politik, mestinya memiliki modalitas sosial politik memadai dan tetap konsisten dalam memperjuangkan visi kerakyatan, menjalankan fungsi *governing* dan representasi serta menjadi delegator bagi rakyat di daerah pemilihannya dan selalu hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan.

Kata Kunci: Modalitas Politik dan Kemenangan

## **PENDAHULUAN**

Tata kelola pemerintahan Negara yang demokratis selalu ditandai dengan adanya penghargaan dan penghormatan istimewa atas hak-hak politik rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Indonesia sebagai sebuah negara besar yang menganut asas demokrasi telah memberikan hak yang setara dalam bidang hukum, ekonomi, sosial dan politik bagi seluruh warganya.

Pengakuan atas kekuasaan rakyat tersebut tergambar dalam setiap hajatan politik lima tahunan yang diselenggarakan secara teratur dan demokratis. Hal ini terwujud dalam pemilihan umum presiden, legislatif dan pilkada. Peranan masyarakat di sini sangat menentukan kualitas tata kelola pemerintahan Negara dan daerah selama lima tahun berjalan setelah pesta demokrasi usai.

Pemilu serentak yang dilaksanakan secara nasional pada tahun 2019 merupakan momentum politik berharga bagi setiap orang di daerah, bahkan menjadi agenda yang ditunggu-tunggu atau dinantikan oleh setiap warga negara yang telah memenuhi syarat perundang-undangan. Perubahan mekanisme pemilu pasca reformasi tahun 1998 merupakan saat yang tepat dalam menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara serta memberikan kesempatan luas kepada tiap masyarakat menggunakan hak politiknya untuk ikut serta secara aktif dalam kontestasi demokrasi. Partisipasi politik tersebut bukan hanya dalam bentuk memberikan hak suaranya dengan datang ke tempat pemungutan suara (TPS), namun dapat dilihat dari antusiasme warga politik yang mendaftarkan dirinya sebagai calon legislatif maupun calon kepala daerah.

Peluang para kontestan memenangkan pemilu legislatif tentu tidak mudah, sehingga tiap kontestan harus memiliki konsep dan strategi yang dianggap efektif dan unggul dari lawan politik lainnya. Karena itu di antara mereka selalu ada kesempatan yang sama untuk menang dan kalah.

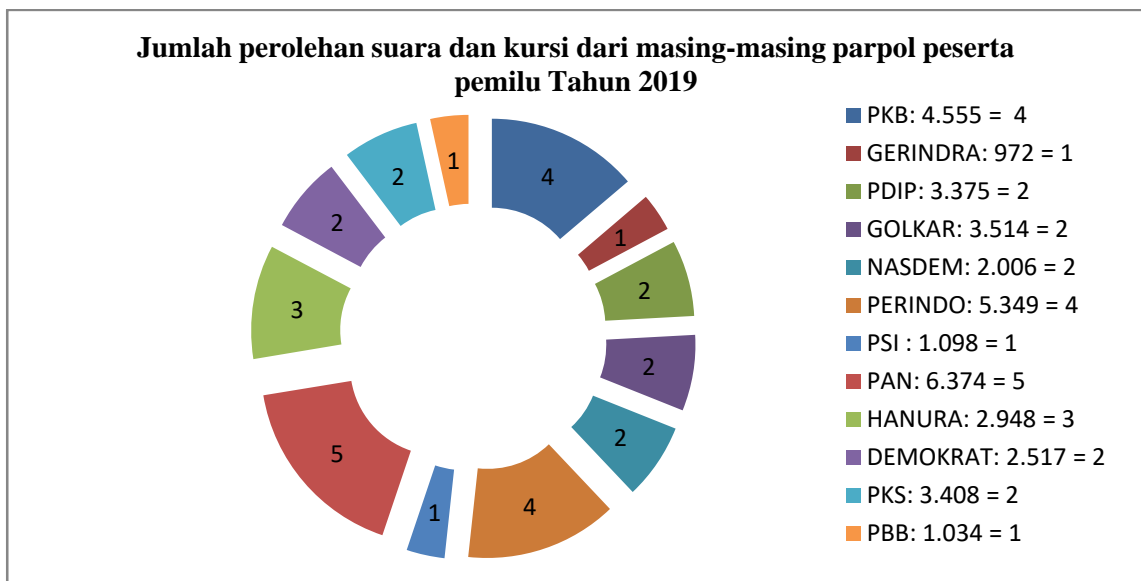
Meskipun dalam kompetisi politik peluang menang dan kalah sulit diprediksi namun secara konseptual pada umumnya kemenangan hanya akan diraih oleh para kontestan yang benar-benar sudah mempersiapkan kapasitas diri secara mumpuni. Oleh sebab itu sejumlah kemampuan terorganisir dan terkonsolidasi dengan baiklah yang dibutuhkan untuk meraih kemenangan dalam seluruh proses kompetisi politik yang diharapkan berjalan secara demokratis.

Menurut Kacung, (2006) ada tiga modal utama yang harus dimiliki, yakni modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*) dan modal ekonomi (*economical capital*). Ketiga modal itu dapat mempengaruhi seorang kontestan dalam memperoleh dukungan dari masyarakat. Semakin besar akumulasi modal yang dimiliki oleh seorang kontestan maka semakin besar pula dukungan yang diperoleh.

Pada tanggal 19 April tahun 2019, pemilu legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dilakukan secara serentak. Semua tahapan pelaksanaan pemilu dipersingkat menjadi 18 bulan, atau 18 bulan sebelum hari-H, yaitu mulai tanggal 1 Oktober tahun 2017. Tahapan awal yang dilaksanakan pada 1 Oktober 2017 adalah verifikasi parpol peserta pemilu.

Kabupaten Manggarai Timur, sebagai salah satu wilayah yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) turut melaksanakan pesta demokrasi ini. Pesta demokrasi yang menentukan siapakah wakil rakyat yang akan duduk di kursi parlemen Kabupaten Manggarai Timur. Berdasarkan hasil pemungutan suara yang diperoleh pada perhelatan pesta demokrasi 17 April tahun 2019, KPU telah menetapkan 30 anggota baru yang berasal dari 12 parpol peraih kursi anggota DPRD Kabupaten Manggarai Timur pada periode 2019 s/d 2024. Data lengkapnya akan tergambar pada grafik berikut ini.

Grafik: 1. Data Jumlah Perolehan Kursi dari masing-masing Parpol Peserta pemilu Tahun 2019



Sumber data: Diolah dari KPU Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019

Bertolak dari data yang telah ditampilkan pada grafik: 1 tampaknya tak ada parpol satu pun yang memperoleh dukungan suara mayoritas di parlemen. Karena perolehan suara dari tiap calon terpilih pada masing-masing parpol sangat sedikit dan bervariasi jumlahnya.

Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada perolehan suara dari Ferdinandus Mazmur (FM) sebagai calon terpilih dari partai Hanura daerah pemilihan V yang meliputi kecamatan Kota-Komba dengan perolehan 988 suara. Dugaan penulis fenomena kemenangan FM ini dipengaruhi oleh sejumlah modalitas yang dimiliki antara lain: modal sosial, modal ekonomi dan modal politik.

Dengan demikian menarik untuk diteliti fenomena kemenangannya karena FM adalah seorang pendatang baru dalam kancah politik lokal Manggarai Timur. Lahir dari keluarga yang biasa saja dengan perjalanan karir yang juga biasa-biasa saja, tetapi ia mampu bersaing dan menang dari sejumlah lawan politik kuat yang berasal dari desa dan wilayah pemilihannya.

Pada tahun 2014, hanya seorang saja yang maju sebagai calon anggota legislatif dari desanya yang diusung PAN tetapi tidak lolos. Kemudian pada tahun 2019 calon anggota legislatif yang gagal tersebut kembali maju bersama dengan FM (Hanura), Wiwin Marsela (Golkar), Fransiskus Nadi (PKB), namun dia dan keempat calon lainnya kembali gagal untuk duduk di kursi parlemen Manggarai Timur.

Pada pesta demokrasi 17 April tahun 2019, FM mampu menjadi calon terpilih mengalahkan sejumlah calon dari daerah pemilihannya. Fenomena kemenangan ini telah menjadi semacam kejutan politik baru dan tanda tanya banyak pihak di level lokal karena kemenangannya tak pernah terbayangkan sebelumnya oleh publik dan lawan politiknya.

### **TINJAUAN TEORITIS**

Dalam konteks analisis perhelatan politik, penulis mencoba menjelaskan fenomena kemenangan FM menggunakan sejumlah konsep modalitas, karena diduga kuat kemenangannya dipengaruhi oleh beberapa modalitas yang mampu diorganisir dengan efektif dalam kontestasi politik lokal.

Adapun modalitas yang harus dimiliki oleh seorang kandidat yang hendak mengikuti kontestasi politik dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, pilkada, dan pemilihan

legislatif yaitu: modal politik, modal sosial dan modal ekonomi, yang dapat dielaborasi berikut.

### **Modal Politik**

J.A Booth dan P.B Richard mengartikan modal politik sebagai aktivitas warga Negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi. Sedangkan A. Hick dan J. Misra mengatakan modal politik adalah berbagai fokus pemberian kekuasaan / sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dioperasikan atau berkontribusi terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum, (Baharuddin & Purwaningsih, 2017:141)

Modal politik juga dapat diartikan sebagai sejumlah kekuatan atau dukungan yang berasal dari partai politik (koalisi partai) dan dukungan para elit politik lokal dari organisasi politik dan organisasi sosial kemasyarakatan kepada para calon yang dianggap dapat mewakili kepentingannya melalui pemilihan legislatif. Dalam konteks politik lokal (daerah) para elit lokal telah banyak menduduki jabatan politik dan jabatan-jabatan strategis lain yang mempunyai peran penting dan berpengaruh terhadap kelompok dan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Selain dukungan partai politik, para kontestan juga memerlukan dukungan elit-elit politik lokal karena elit politik tersebut memiliki peran yang menonjol dalam politik dan bidang lain serta memiliki pengaruh yang besar dengan keunggulan-keunggulan yang dimiliki calon kepala daerah. Kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan di partai politik dengan melihat posisi strategis dalam struktur jabatan di partai politik dan pemerintahan.

Dukungan elit partai politik biasanya hanya akan diberikan kepada figur yang memiliki keunggulan dan memenuhi sejumlah syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas termasuk di dalamnya moralitas yang baik dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil *lobby* elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan di usung untuk dijagokan sebagai kontestan dalam perhelatan pemilu legislatif karena banyak pihak berpendapat bahwa dalam politik tidak ada makan siang “gratis”.

Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, para calon legislatif dipastikan akan kalah dalam kompetisi. Sebab dalam permainan politik praktis setiap petarung harus mempersiapkan diri dengan dukungan sumberdaya yang memadai baik kemampuan internal maupun kemampuan eksternal yang terus dibangun dan dikembangkan secara berkelanjutan. Sebab dalam kompetisi politik segala kemungkinan yang baik berupa kemenangan maupun kekalahan selalu datang silih berganti tanpa diduga sebelumnya. Karena itu tiap kontestan harus bisa memastikan bahwa mesin partai politik dan seluruh jaringannya selalu bekerja maksimal dan berpihak padanya.

### **Modal Sosial**

Pierre Bourdieu mendefinisikan modal sosial sebagai keseluruhan sumberdaya, baik yang aktual maupun potensial yang terkait dengan kepemilikan jaringan hubungan kelembagaan yang tetap dengan didasarkan pada saling kenal dan saling mengakui. Dengan kata lain, dengan menjadi anggota dari suatu kelompok orang akan memperoleh dukungan dari modal yang dimiliki secara kolektif. Selanjutnya ia mengatakan bahwa besarnya modal sosial yang dimiliki seorang anggota dari suatu kelompok tergantung pada seberapa jauh kuantitas maupun kualitas jaringan hubungan yang dapat diciptakannya, serta seberapa besar volume modal ekonomi, budaya dan sosial yang dimiliki oleh setiap orang yang ada dalam jaringan hubungannya, (Syahra, 2003:3).

Bourdieu juga menegaskan modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk *social capital* (modal sosial) berupa insitusi lokal atau kekayaan sumber daya alam.

Modal sosial yaitu dukungan figur atau kandidat karena ketokohan sehingga menimbulkan kepercayaan (*trust*) dari masyarakat serta menciptakan interaksi sosial dan jaringan-jaringan yang akan mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohnya di dalam masyarakat (tokoh agama, adat, organisasi kepemudaan, profesi dan lain sebagainya). Sejumlah aspek ini mesti dimiliki oleh setiap kontestan karena sangat berguna sebagai basis memobilisasi dukungan politik warga dan membangun modal sosial.

Selain itu relasi sosial dengan tokoh masyarakat dan masyarakat luas juga menjadi bagian yang tak bisa diabaikan oleh seorang kontestan. Melalui berbagai kunjungan informal terhadap komunitas sosial seperti arisan, kelompok tani, nelayan, karang taruna,

PKK dan organisasi sosial lainya tentu makin memperkokoh basisnya di massa akar rumput. Membangun relasi sosial melalui kunjungan informal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan kedekatan personal dan kepercayaan publik terhadap seorang figur publik yang diyakini bisa merepresentasikan kepentingannya atau sebagai seorang delegator dalam menyampaikan aspirasinya. Menurut Bourdieu seorang delegasi tidak sekedar menjadi tanda atau simbol pasif tetapi juga mempunyai otoritas untuk berbicara atas nama orang lain, (Haryanto, 2014:84).

Dalam politik yang masih menjunjung tinggi nilai demokrasi maka tingkat kepercayaan publik adalah hal yang niscaya sebagai dasar untuk memperoleh kekuasaan. Seseorang atau sekelompok orang yang akan dipilih berawal dari rasa percaya dan atas dasar kepercayaan itu masyarakat kemudian menjatuhkan pilihan politiknya. Sebab itu jika kelak kekuasaan yang diberikan kepadanya dilanggar, maka masyarakat dengan mudah tidak percaya lagi dan akan memberikan mandat kekuasaannya kepada orang lain yang menurutnya lebih baik untuk periode berikutnya.

Pengaruh ketokohan dan popularitas, latar belakang pendidikan dan pekerjaan kontestan juga akan mempermudah membangun relasi dan kepercayaan publik. Dengan demikian modal sosial sangat menentukan kemenangan, karena untuk membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat kandidat harus memiliki pengaruh tersebut.

Sedikitnya para pakar membagi modal sosial dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang menekankan pada jaringan hubungan sosial (*social network*) dan kelompok yang lebih fokus pada karakteristik yang melekat (*embedded*) pada diri individu manusia yang terlibat dalam sebuah interaksi sosial.

Dalam mengikuti kontestasi pemilihan umum legislatif setiap orang dapat mencalonkan dirinya pada pemilu dan sebagai calon tidak hanya mengandalkan modal sosial tanpa tambahan modal lainnya. Dengan modal sosial dan *network* yang luas dan modal sosial lain dari masing-masing calon tentu tak dapat dipungkiri bahwa tiap orang berpeluang sama untuk menang. Seperti perwakilan buruh, perwakilan pemuda, nelayan atau siapa saja jika didukung penuh oleh institusi maka tidak dapat dinafikan akan menghasilkan sebuah kemenangan bagi calon tersebut dengan misi yang sama memperjuangkan apa yang disebut dengan kata “kesejahteraan” bagi anggotanya.

### **Modal Ekonomi**

Dalam konteks kompetisi politik seperti pemilu legislatif maupun pemilihan kepala daerah, modal ekonomi memiliki peran penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” utama mesin politik yang digunakan. Saat musim kampanye misalnya membutuhkan biaya politik yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan logistik seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai politik yang dicalonkannya.

Modal ekonomi, menurut Bourdieu, memang dengan mudah dapat dikonversikan ke dalam bentuk uang, dan dapat dilembagakan dalam bentuk hak kepemilikan. Tetapi dalam kondisi tertentu modal budaya juga dapat dikonversikan menjadi modal yang memiliki nilai ekonomi, dan dapat dilembagakan, seperti kualifikasi pendidikan. Demikian pula modal sosial dalam kondisi tertentu dapat dikonversikan ke dalam modal ekonomi dan bahkan dapat dilembagakan dalam bentuk gelar kesarjanaa, (Syahra, 2003:3).

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan (jarak waktu komunikasi yang pendek) antara pemilih dan calon politik. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon politisi mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.

### **Pemilihan Umum (Pemilu)**

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam proses pelaksanaannya, Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud, dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: mandiri, jujur, adil,

berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien.

Apabila penyelenggaraan pemilu sesuai dengan asas dan prinsip di atas, maka pemilu tersebut akan mencapai tujuan pemilu dengan baik. Karena tujuan pemilu adalah : Memperkuat sistem ketatanegaraan yang demokratis, mewujudkan pemilu yang adil dan berintegritas, menjamin konsistensi pengaturan sistem pemilu, pemberian kepastian hukum dan mencegah duplikasi dalam pengaturan pemilu, serta mewujudkan pemilu yang efektif dan efisien.

Partai politik dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan i. menyertakan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 173)

Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu," bunyi Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 ini. Ditegaskan dalam UU ini, Partai Politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU, dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik, dan disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Adapun penetapan partai politik sebagai Peserta Pemilu, menurut UU ini, dilakukan dalam sidang pleno KPU paling lambat 14 (empat belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Sementara penetapan nomor urut partai politik sebagai peserta pemilu

dilakukan secara undi dalam sidang pleno KPU yang terbuka dengan dihadiri wakil Partai Politik peserta Pemilu.

### **METODE PENELITIAN**

Menurut Arikunto (1992:27) penentuan suatu metode penelitian, sangat tergantung dari tujuan dan pendekatan yang diinginkan. Sedangkan menurut Nawawi (1987:62) metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Modal Politik**

Ada tiga (3) modalitas sosial politik yang harus dimiliki seorang kandidat yang ingin bertarung dalam pentas politik lokal. Ketiga modal tersebut adalah modal politik, modal ekonomi dan modal sosial. Modal politik berkaitan dengan sumber daya politik seperti partai politik, dukungan elit politik, rekam jejak atau sepak terjang dalam dunia perpolitikan serta jabatan politik. Modal sosial berhubungan dengan dua modal utama, yaitu jaringan sosial yang berkaitan dengan keluarga dan karakter sosial yang berhubungan dengan sikap figur atau kandidat itu sendiri. Sedangkan modal ekonomi berhubungan dengan dana yang digunakan sebelum, selama dan setelah pentas politik.

Untuk menggambarkan modalitas sosial politik yang menjadi kekuatan utama FM dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019, yang terdiri dari beberapa aspek seperti, adanya dukungan dari partai politik dan tim sukses yang solid.

#### **Adanya dukungan dari Partai Politik**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Modalitas sosial Politik kemenangan FM dalam pemilihan legislatif Manggarai Timur tahun 2019 berkaitan dengan adanya dukungan partai politik Hanura kepada FM berupa penetapan dirinya sebagai caleg oleh partai politik setelah melewati prosedur dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh tim 7 mulai dari persiapan berkas caleg, pengumuman, pendaftaran, penyeleksian dan penugasan partai. Jadi partai politik lebih banyak memberikan dukungan secara administratif.

#### **Adanya tim sukses yang solid**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Modalitas sosial Politik kemenangan FM dalam pemilihan legislatif Manggarai Timur tahun 2019 menunjukkan bahwa kekompakan dari tim sukses serta strategi yang mengandalkan budaya kekeluargaan merupakan modal penting dalam usaha memenangkan figur FM. Untuk memperkuat adanya tim sukses yang solid dari FM pada pemilihan legislatif 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Tim Sukses FM pada Pileg 2019**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Wilayah
1	Adolfus Latong	SD	Ketua Tim Sukses	Nunur, Desa Mbengan
2	Kanis Nggadung	SD	Tim Sukses	Nunur, Desa Mbengan
3	Leonardus Ngggu	SD	Tim Sukses	Nunur, Desa Mbengan
4	Alfridus Tasar	SD	Tim Sukses	Kemus, Desa Mbengan
5	Stef Talas	SMP	Tim Sukses	Bungan, Desa Mbengan
6	Rispi Robot	SMA	Tim Sukses	Susang, Desa Ranakolong
7	Anus Abu	SD	Tim Sukses	Mesi, Desa Ranakolong
8	Hilarius Nana	SD	Tim Sukses	Tiwamoro, Desa Ranakolong

Sumber: Data diolah penulis di lapangan, Tahun 2019

Pada tabel 1 di depan, tingkat pendidikan dari mayoritas tim sukses adalah tamatan Sekolah Dasar (SD). Terhitung ada 6 dari 8 tim sukses yang hanya mengenyam pendidikan di bangku Sekolah Dasar. Semua tim sukses yang dipilih oleh Bapak FM adalah orang - orang yang merupakan tokoh panutan serta memiliki integritas tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.

Misalkan saja Adolfus Latong adalah seorang tokoh masyarakat yang memiliki sepak terjang atau *track record* yang sangat baik dalam dunia perpolitikan dalam kaitan dengan tim sukses. Beliau pernah dipercaya oleh paket Yoga (Pemenang pada kontestasi pilkada Manggarai Timur tahun 2008 dan 2013). Pada saat itu ada tujuh (7) pasangan calon yang bersaing memperebutkan kursi bupati dan wakil bupati periode 2008 – 2013.

Ketujuh pasangan tersebut adalah Yosep Tote – Andreas Agas, Yoseph Biron Aur – Gorgonius Bajang, Sabinus Suardi – Galus Ganggus, Katas Petrus – Junaidin Zakaria, Martinus Nahas – Ferdinandus Jerau, David Sutarto – Agustinus Liontas dan Romandus Ndaulendong – Turut Theodora Eufrasia.

Pada Pilkada Kabupaten Manggarai Timur tahun 2013, paket Yoga ( Yosep Tote – Andreas Agas tampil kembali untuk merebut kursi bupati dan wakil bupati. Tampil sebagai petahana pada pentas politik ini, paket Yoga kembali meraih kemenangan dan berhasil menjabat sebagai bupati dan wakil bupati selama dua periode. Pada pilkada ini, paket Yoga kembali memberi kepercayaan kepada Bapak Adolfus Latong sebagai Tim sukses untuk wilayah Kecamatan Kota Komba bagian tengah.

FM mengatakan bahwa alasan memilih Adolfus Latong dan keenam tim sukses lain adalah karena mereka memiliki *track record* yang baik dalam perjalanan karir sebagai “tim sukses”. FM juga mengatakan bahwa dirinya memilih mereka dengan tidak mempertimbangkan tingkat pendidikan, karena ada banyak orang berpendidikan tapi tidak memiliki integritas yang baik dan panutan dalam kehidupan bermasyarakat dan pandai berkomunikasi dengan masyarakat bawah.

FM juga mengatakan bahwa ketika pilkada Manggarai pada periode sebelumnya, Adolfus Latong dipercaya oleh paket Credo (Christian Rotok dan Deno Kamelus), paket inipun menang dan berhak memimpin Kabupaten Manggarai (sebelum dimekarkan menjadi Kabupaten Manggarai Timur dan Manggarai Tengah).

### **Modal Sosial**

Deskripsi tentang modal sosial sebagai salah satu kekuatan utama FM dalam memenangkan pemilihan legislatif tahun 2019, dapat digambarkan dari beberapa aspek antara lain adanya interaksi sosial dengan masyarakat, adanya kepercayaan dari masyarakat, adanya jaringan-jaringan sosial yang mendukung.

### **Adanya Interaksi Sosial dengan Masyarakat**

Berdasarkan hasil kajian lapangan ditemukan bahwa Modalitas sosial Politik kemenangan FM dalam pemilihan legislatif Manggarai Timur pada tahun 2019, yaitu adanya interaksi yang baik antara FM dengan masyarakat luas di daerah pemilihannya. Interaksi ini bukanlah pencitraan, tetapi merupakan sifat dasar dari beliau. Interaksi

tersebut terwujud dalam banyak kegiatan, misalnya pada saat arisan, pesta sekolah, sambut baru, kematian / kedukaan, dan lain-lain.

FM dan Adolfus Latong selalu menghadiri berbagai Acara Pesta Sambut Baru di Kampung Mesi Desa Ranakolong. Kehadiran mereka dalam acara sambut baru ini merupakan bentuk dari sikap penghargaan atas undangan masyarakat. Biasanya pada saat pesta sambut baru, tuan pesta hanya akan mengundang orang dalam kampung atau pun di luar kampung (dengan catatan itu adalah keluarga mereka).

Pada kesempatan ini, Bapak FM hadir sebagai undangan yang berasal dari luar kampung dan juga bukan bagian dari kerabat dekat. Hal ini mau menggambarkan bahwa sikap egaliter dan solider dari FM kepada siapapun merupakan karakter dari kepribadiannya yang selalu menjadi daya tarik dan simpati warga. Sebab itu FM selalu mendapat undangan untuk menghadiri hajatan warga sekampung maupun warga di luar kampungnya.

#### **Adanya jaringan-jaringan sosial yang mendukung**

Berdasarkan hasil olah data lapangan ditemukan bahwa Modalitas sosial Politik kemenangan FM dalam pemilihan legislatif Manggarai Timur tahun 2019 adalah karena memiliki hubungan sosial yang luas atau jaringan-jaringan sosial yang selalu memberinya dukungan penuh. Jaringan sosial tersebut adalah, keluarga, organisasi, komunitas masyarakat pendukung, dan pekerjaan istri sebagai tenaga medis yang sudah banyak di kenal luas warga terutama dalam membantu pelayanan kesehatan masyarakat selama bertahun - tahun.

Sesungguhnya peran istri dalam kontestasi politik sangat signifikan karena kehadiran istrinya sebagai tenaga medis dalam melayani masyarakat dan selalu hadir memberikan layanan kesehatan dengan sepenuh hati ketika dibutuhkan masyarakat. Ibu Elisabeth Bhoki yang berperan sebagai istri dan pelayan kesehatan kepada masyarakat yang ada di Desa Mbegan dan Ranakolong sungguh menjadi hal yang sangat positif dirasakan masyarakat luas.

Sebab itu kemenangan FM tak lepas dari peran atau pengaruh dari profesi serta sikap hidup dari sang istri yang dengan sabar dan ramah selalu melayani serta mengunjungi para pasien dari rumah ke rumah. Masyarakat rupanya sangat mengapresiasi sikap dan tindakan baik dari pasangan ini. FM ketika ditemui mengungkapkan bahwa

kadang dirinya harus rela pergi bersama istrinya apabila mendapat informasi tentang pasien yang membutuhkan penanganan segera. Sebagai suami yang baik saya tentu mendukung pekerjaan istri dengan menghantar dan menjemputnya, bahkan dalam beberapa peristiwa, saya harus sabar menemani / menunggu sampai istri selesai melayani pasien.

Demikian juga dengan beberapa warga yang ditemui berpandangan bahwa sebagai masyarakat kami selalu menjaga hubungan sosial dan setidaknya momentum pemilu legislatif menjadi saat yang tepat untuk membalas hubungan sosial yang baik dengan Ibu Elisabet Bhoki yakni dengan cara memberikan dukungan politik nyata kepada suaminya dalam pemilu legislatif.

Dari hasil olahan data di depan memberikan gambaran kuat bahwa sesungguhnya hubungan resiprokal yang telah dibangun lama di antara warga dengan keluarga FM sangat membantu kemenangan kerja politiknya.

### **Modal Ekonomi**

Modalitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan modal lainnya, seperti modal politik dan modal sosial. Karena itu sejumlah modal ini setidaknya disinergikan untuk mendorong kemenangan yang nyata dalam kontestasi politik.

Temuan penelitian membuktikan bahwa kemenangan FM dalam pemilihan legislatif tahun 2019, dengan memanfaatkan modal ekonomi seperti, adanya dukungan dana dan materi (fasilitas) untuk mobilisasi dukungan logistik dalam kegiatan kampanye politik juga tak lepas dari perhatiannya. Sejumlah dukungan finansial di antaranya dapat dideskripsikan sebagai berikut:

### **Adanya Dukungan Dana**

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Modalitas ekonomi juga bagian dari kunci kemenangan FM dalam pemilihan legislatif Manggarai Timur tahun 2019. Karena secara faktual FM telah mengeluarkan dana sebanyak Rp. 57.500.000. Dana untuk pembuatan kalender, spanduk / baliho dan stiker adalah Rp. 7.500.000, sedangkan dana untuk pertemuan tatap muka adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan untuk kampanye *mout to mouth, door to door* membutuhkan biaya sebesar Rp.20.000.000. Untuk biaya kebutuhan lain, Beliau menghabiskan dana Rp. 5.000.000.

Walaupun akumulasi biaya yang dimiliki FM ini masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan calon lain, tetapi tetap efektif dan bermanfaat karena dana ini telah dikelola dengan baik dan benar untuk penggalangan dukungan.

#### **Adanya dukungn materi untuk kampanye**

Untuk menggambarkan tentang modalitas ekonomi pada aspek dukungan material atau fasilitas dari kasus kemenangan FM dalam pemilihan legislatif Manggarai Timur 2019, dapat dicermati dari adanya dukungn materil untuk kampanye berupa fasilitas yang digunakan FM selama masa kampanye, seperti kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, yang bersifat pribadi adalah satu buah sepeda motor. Fasilitas pendukung lain seperti kursi, tenda, *sound system* dan lain - lain, merupakan sumbangan sukarela dari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini telah terjalin hubungan sosial yang harmonis di antara mereka sehingga masyarakat dengan senang hati memberi dukungan material kepada FM dan tim kerjanya.

#### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil analisis Modalitas sosial Politik dari Studi Kasus Kemenangan FM dalam Pemilihan Legislatif Manggarai Timur tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa Modalitas sosial politik berupa Modal Politik, Modal Ekonomi dan Modal Sosial sangat efektif dalam memenangkan kontestasi politik. Secara konseptual dikatakan bahwa sinergitas antara ketiga modalitas sosial politik ini sangat signifikan mempengaruhi kemenangan seseorang dalam kontestasi politik. Hal itu berarti kompetisi politik seperti pemilu legislatif membutuhkan biaya yang sangat besar dari tiap kontestan.

Namun kasus kemenangan FM dalam kontestasi politik pemilu legislatif di Kabupaten Manggara Timur, sedikit berbeda karena selain modal politik dan ekonomi yang dimiliki masih relatif terbatas, ternyata modal sosial yang dirawat dan diorganisir dengan efektif oleh FM justru sangat signifikan memberi kemenangan nyata bagi dirinya. Hal itu terjadi karena integritas FM dan istrinya yang sangat bersahaja di tengah kehidupan masyarakat luas. Modal sosial inilah yang menjadi keunggulan utama FM yang kemudian dapat menggeser figur kuat lain yang lebih banyak mengandalkan modal politik dan ekonomi yang dimiliki sehingga tak pernah membayangkan bisa dikalahkan FM yang masih minim modal ekonomi dan politik dengan calon lain.

Karena itu bagi para calon kontestan yang tidak memiliki kesiapan modalitas sosial politik memadai, apalagi mengabaikan salah satu aspek dari berbagai aspek lain dalam perhelatan politik sudah pasti akan tersingkir dari kompetisi politik.

Dengan demikian sangat dibutuhkan pendidikan politik warga dari institusi yang berkompeten seperti partai politik dan elemen penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu secara terprogram dan berkelanjutan di Dapil masing-masing. Pendidikan politik mesti dilakukan agar kelak warga masyarakat lebih melek politik dan dapat menjadi pemilih yang rasional sehingga dapat menentukan pilihan politik secara bertanggung jawab dan selalu memilih pemimpin atas dasar pertimbangan rasional.

Para kontestan peserta pemilu legislatif yang telah terpilih sebagai wakil rakyat mesti tetap konsisten dalam memperjuangkan visi kerakyatan menjalankan fungsi *governing* dan representasi secara efektif serta delegator bagi rakyat di daerah pemilihannya dan selalu hadir di tengah masyarakat ketika dibutuhkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Hadari, Namawi. 1987. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Haryanto, Venan, 2014, *Ranah Politik Menurut Pierre Bourdieu*, Penerbit Ledalero, Maumere.
- Kacung, Marijan, 2006, *Demokratisasi di Daerah: Pelajaran dari Pilkada secara Langsung*, Pustaka Eureka, Surabaya.
- Suharsimi, Arikunto. 1992. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.

### B. Jurnal

- Baharuddin, T., & Purwaningsih, T. (2017). Modalitas Calon Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(1), 205–237. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4176>

- Haryanto (2014). Kebangkitan Party ID: Analisis Perilaku Memilih dalam Politik Lokal di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 17 Nomor 3. Universitas Gajah Mada Yogyakarta
- Hidayat, M. H. (2016). Strategi Politik Pemenangan Pasangan Kandidat Vonnie Anneke Panambunan-Joppi Lengkong Dalam Pemilu Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2015. *Jurnal Politico*, 3(1).
- Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 5(1),1–22.

<http://www.jurnal masyarakat dan budaya.com/index.php/jmb/article/view/25>

### **C. Skripsi, Tesis, Disertasi**

- Ananias Jacob (2017). Preferensi Masyarakat Etnis Timor Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 di Kota Kupang. Program Magister Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga. Surabaya
- Ayu Prasasti Mega Dini. 2015. “Strategi Pemenangan Anggota Legislatif Terpilih Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Sidoarjo. Program Studi Politik Islam Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.”
- Harpin Syah. (2017). Strategi Politik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Calon Bupati Pada Pemilu Kabupaten Merangin Tahun 2013 (Kasus: Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Al-Haris dan Khafied Moein). Program Megister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Univer.
- Stella Maria Ignasia Pantouw. (2012). Modalitas Dalam Kontestasi Politik (Studi tentang Modalitas dalam Kemenangan Pasangan Hanny Sondakh dan Maximiliaan Lomban pada Pemilu Kabupaten Bitung Sulawesi Utara tahun 2010). Program Studi Magister Ilmu Politik Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang

### **D. Dokumen**

- Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Hanura
- Daftar Tim Sukses Ferdinandus Mzmur pada Pileg 2019
- KPU Manggarai Timur 2019. Jumlah Perolehan Suara Partai Peserta Pemilu di Kabupaten Manggarai Timur (Pemilihan DPRD)
- Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang  
Dana Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang  
Kampanye Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang  
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang *Pemilihan Umum*